

ABSTRAK

Keabsahan Alat Bukti Elektronik Berupa Rekaman CCTV Dalam Persidangan Perkara Pidana (Analisis Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)

Oleh : Solihen

Dosen Pembimbing Utama : Hidayat Andyanto, S.H., M.Si.

Dosen Pembimbing Pendamping : Moh. Zainol Arief, S.H., M.H.

Seiring perubahan zaman, *Closed Circuit Television* (CCTV) yang tadinya digunakan sebagai alat untuk mengetahui aktivitas orang-orang sekarang digunakan sebagai alat bukti dalam suatu persidangan. Namun dalam KUHAP belum mengatur alat bukti rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, walaupun CCTV belum diatur dengan jelas sebagai alat pembuktian tidak serta merta mengakibatkan CCTV tidak digunakan dalam pembuktian suatu tindak pidana.

Perumusan masalah dari skripsi ini adalah Bagaimana kualifikasi suatu tindak pidana pembunuhan yang didahului dengan perencanaan dalam hukum pidana di Indonesia dan Bagaimana tanggungjawab hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui dan mendapatkan solusi dari rumusan masalah tersebut.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan beberapa sumber bahan hukum primer dan sekunder, serta penelusuran bahan hukum melalui perundang-undangan dan literatur lainnya.

Batasan Kriteria Informasi Elektronik Atau Dokumen Elektronik Berupa Rekaman CCTV Dalam Sidang Perkara Pidana merupakan Alat bukti elektronik berupa rekaman CCTV merupakan perluasan dari alat bukti yang ditentukan oleh KUHAP untuk mengungkap terjadinya suatu peristiwa tindak pidana khususnya terkait pembuktian di persidangan dalam UU ITE harus memenuhi syarat formil dan materil agar informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah.

Pengaturan rekaman CCTV sebagai alat bukti di persidangan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak diatur. Namun, dalam beberapa Undang-Undang Khusus lain terdapat pengaturan mengenai rekaman CCTV yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti, dalam hukum acara pidana umum yang berlandaskan KUHAP. Kekuatan pembuktian rekaman CCTV saling berkaitan dengan cara memperoleh informasi/data elektronik tersebut. Dalam hal rekaman CCTV yang merupakan perluasan alat bukti dalam UU ITE merupakan barang bukti disesuaikan dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa terkait keadaan-keadaan dalam perbuatan pidana, maka dapat diperoleh alat bukti petunjuk yang kuat untuk mencari dan menegaskan kebenaran materiil dari suatu perkara.

Kata kunci : Keabsahan Alat Bukti Elektronik CCTV.

ABSTRACT

The Validity of Electronic Evidence in the Form of CCTV Recordings in Criminal Case Trials (Analysis of Article 5 Paragraph (2) of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions)

By: Solihen

Main Supervisor: Hidayat Andyanto, S.H., M.Si.

Assistant Supervisor: Moh. Zainol Arief, S.H., M.H.

As times change, Closed Circuit Television (CCTV), which was previously used as a tool to find out people's activities, is now used as evidence in a trial. However, the Criminal Procedure Code does not yet regulate CCTV recording evidence as valid evidence as intended in Article 5 paragraph (1) and (2) Article 5 Paragraph (2) of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2024. 2008 concerning Electronic Information and Transactions, even though CCTV has not been clearly regulated as a means of evidence, this does not necessarily mean that CCTV is not used in proving a criminal act.

The problem formulation of this thesis is how to qualify a criminal act of murder which is preceded by planning in criminal law in Indonesia and what is the legal responsibility for the perpetrator of the crime of premeditated murder of a child. The purpose of writing this thesis is to find out and get a solution to the problem formulation.

The research method in writing this thesis is normative using a statutory approach with several sources of primary and secondary legal materials, as well as tracing legal materials through legislation and other literature.

Limitations of Criteria for Electronic Information or Electronic Documents in the Form of CCTV Recordings in Criminal Case Trials: Electronic evidence in the form of CCTV recordings is an extension of the evidence determined by the Criminal Procedure Code to reveal the occurrence of a criminal event, especially regarding evidence at trials in the ITE Law, must meet formal requirements and material so that electronic information and documents can be used as valid evidence.

Regulation of CCTV recordings as evidence in trials in Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law is not regulated. However, in several other special laws there are regulations regarding CCTV footage which can be used as evidence, in general criminal procedural law which is based on the Criminal Procedure Code. The evidentiary strength of CCTV recordings is interrelated with the method of obtaining the electronic information/data. In the case of CCTV recordings, which are an extension of the evidence in the ITE Law, which are evidence adapted to the statements of witnesses and the defendant's statements regarding the circumstances of the criminal act, strong evidence can be obtained to find and confirm the material truth of a case.

Keywords: Validity of CCTV Electronic Evidence.